

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena belum ditemukannya cara yang jitu untuk menangani permasalahan kemiskinan yang selama ini terjadi. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat beberapa program yang mengedepankan untuk menangani permasalahan ini khususnya di Kabupaten Bekasi. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat diwujudkan dan ditingkatkan apabila permasalahan kemiskinan dapat diatasi. Penurunan angka kemiskinan dapat terwujud apabila ada pertumbuhan ekonomi yang adil di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan tidak ada/tidak terjadinya gejolak sosial. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, maka dibawah ini akan ditampilkan jumlah penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik mengenai angka kemiskinan yang ada di Indonesia baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin

Tingkat	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	25,95 juta (9,82%)	9,41 juta (9,41%)	26,42 juta (9 78%)	27,54 juta (10,14%)	26,16 juta (9,54%)
Jawa Barat	3,62 juta (7,44%)	3,40 juta (6,91%)	3,92 juta (7,88%)	4,20 juta (8,40%)	4,07 juta (8,06%)
Kab. Bekasi	157,2 ribu (4,37%)	149,43 ribu (4,01%)	186,30 ribu (4,82%)	202,73 ribu (5,21%)	201,14 ribu (5,01%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (Maret 2018 s/d Maret 2022)

Dari data yang ditampilkan diatas, dapat diketahui bahwa angka kemiskinan baik secara tingkat nasional bahkan sampai tingkat kabupaten atau kota mengalami tren penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Namun, hal itu tidak dapat berjalan secara knsisten dikarenakan angka kemiskinan kembali mengakami kenaikan yaitu ketika memasuki masa pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Hal ini terjadi

dikarenakan banyak akses yang dibatasi sehingga banyak masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya masuk ke dalam roda kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan agar masyarakat yang terjebak dalam roda kemiskinan dapat segera memperbaiki kondisi ekonominya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, terlihat dari data yang ditampilkan diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Berikut ditampilkan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat 2023

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	4 195,3	4 071,0	3 888,6
Bogor	491,2	474,7	453,8
Garut	281,4	276,7	260,5
Cirebon	271,0	266,1	249,2
Bandung	269,2	258,6	245,5
Cianjur	260,0	246,8	240,1
Indramayu	228,6	225,0	214,7
Bekasi	202,7	201,1	204,1
Karawang	210,8	199,9	187,2
Tasikmalaya	200,6	194,1	186,9
Bandung Barat	190,8	183,7	179,4
Sukabumi	194,4	186,3	178,7
Subang	159,0	155,3	152,3
Majalengka	151,1	147,1	138,7
Kuningan	143,4	140,3	133,9
Kota Bekasi	144,1	137,4	129,4
Sumedang	126,3	120,1	111,4
Kota Bandung	112,5	109,8	102,8
Ciamis	96,6	94,0	90,8
Purwakarta	84,3	83,4	81,5
Kota Tasikmalaya	89,5	87,1	79,4
Kota Bogor	80,1	79,2	75,0
Kota Depok	63,9	64,4	62,0
Pangandaran	39,1	37,9	36,7
Kota Cirebon	32,0	31,5	29,5
Kota Cimahi	32,5	31,2	28,6
Kota Sukabumi	27,2	26,6	25,0
Kota Banjar	13,4	12,7	11,7
Sumber: BPS			

Showing 1 to 28 of 28 entries

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-7 (tujuh) dalam jumlah penduduk yang tergolong miskin. Hal itu harus segera diatasi untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam menangani kemiskinan, maka dibutuhkan beberapa peran dari dinas yang ada. Diantara banyaknya dinas yang ada di Kabupaten Bekasi, ada suatu dinas yang memiliki peran sangat penting dalam menangani kemiskinan yaitu Dinas Sosial. Dinas sosial merupakan salah satu instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 58 Tahun 2016 pasal 11 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang sosial;
- b) pelaksanaan tugas operasional di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c) penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- d) pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- e) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang sosial; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Cella Mokot (2020) yang berjudul Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011 pasal 2 tentang Penanganan Fakir miskin, disebutkan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dinas Sosial tidak bekerja sendirian dalam berusaha mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.724-Dinsos/2023, Dinas Sosial menjalin kolaborasi dengan beberapa dinas lainnya yang ada di dalam pemerintahan Kabupaten

Bekasi. Beberapa dinas tersebut antara lain yaitu antara lain yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun beberapa program yang selama ini sudah berjalan antara lain yaitu ada Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Beberapa program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan menargetkan keluarga yang tergolong miskin dan bantuan yang diberikan dilakukan secara berkala. Kemudian ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan untuk anak-anak yang tergolong miskin sehingga dapat melanjutkan pendidikannya dengan beberapa bantuan yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi beberapa kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial seperti pemetaan target yang tidak tepat. Ketidaktepatan ini menyebabkan masih adanya beberapa masyarakat yang berhak menerima bantuan namun mereka tidak mendapatkannya, kemudian ada juga kekeliruan penerima bantuan yang menyebabkan program yang direncanakan tidak sampai ke target yang seharusnya. Beberapa hal tersebut terjadi karena proses pendataan yang dilakukan berdasarkan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Dalam membenahi beberapa kekurangan yang terjadi, maka dinas sosial harus mampu mengembangkan beberapa inovasi yang lebih bervariasi agar pelaksanaan program yang disiapkan dapat berjalan dengan mulus dan tanpa terkendala. Validasi data orang yang mengalami kemiskinan juga harus diberikan pengawasan dan perhatian yang lebih agar tidak terjadi kekeliruan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa:

- a. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Selain dinas sosial, kemudian ada juga beberapa dinas yang berkolaborasi dengan dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil yang juga memiliki peran dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Dinas ini berperan dalam melakukan pendataan bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang tergolong masuk dalam kategori miskin akan masuk dalam data dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk menentukan berhasil atau tidaknya pemerataan penanganan kemiskinan merujuk pada data masyarakat yang ada. Apabila ada kesalahan dalam pendataan, maka dipastikan pemerataan tersebut tidak akan terwujud. Salah satu peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu adalah pendataan. Pendataan dalam hal ini yaitu data masyarakat yang masih masuk dalam kategori miskin. Kemudian, ada juga dinas lain yang ikut berkolaborasi dengan dinas sosial yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam merencanakan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan, Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran masing-masing dalam mencapai suatu tujuan. Dinas Pendidikan fokus bergerak mengatasi permasalahan di bidang pendidikan seperti program yang diperuntukkan bagi pelajar yang berhak menerima bantuan pemerintah. Kategori pelajar yang berhak menerima bantuan pemerintah yaitu mereka yang kondisi ekonominya tidak berkecukupan sehingga harus menerima bantuan agar dapat melanjutkan pendidikannya.

Sedangkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) fokus bergerak dalam melakukan perencanaan, menyiapkan dana/anggaran, monitoring dan evaluasi atas kinerja beberapa dinas yang berkolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap dinas yang berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan membuat suatu rencana kerja (pengentasan kemiskinan) yang nantinya akan diserahkan dan dibahas secara bersama dengan pihak Bappeda. Bappeda juga memiliki peran penting dalam menyalurkan dana bagi setiap dinas yang memiliki program seperti pengentasan kemiskinan. Program yang direncanakan biasanya menargetkan masyarakat yang kondisi ekonominya lemah sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan semua warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera tanpa terkecuali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kolaborasi kelembagaan yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana hambatan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan kolaborasi dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih gagasan, pemikiran, dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi penelitian ilmu pemerintahan khususnya di bidang penanganan kemiskinan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa dinas yang ada di Kabupaten Bekasi dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menjadikan penelitian terkait pengentasan kemiskinan terdahulu dari berbagai penulis untuk dijadikan referensi baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membantu penelitian ini.

Rujukan pertama dengan judul **“Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang”** yang diteliti oleh Abdul Rasyid Sahar dan Rov Valiant Salomo (2018) menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan isu multisektoral yang kompleks dan dinamis. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan yaitu *collaborative partnership*. Pemetaan solusi yang digunakan merujuk pada keterlibatan organisasi, multidisiplin, dan lintas yuridiksi. Ada beberapa hal yang menghambat proses kolaborasi menuju tingkat yang interaktif dan dinamis, yaitu tidak optimalnya pembangunan dimensi *trust* dan *mutual understanding*

Rujukan kedua dengan judul **“Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta : Program “Gandeng Gendong””** yang diteliti

oleh Eka Putra, Nova Elsyra, dan Muchamad Zaenuri (2020) menyimpulkan bahwa dalam menurunkan angka kemiskinan, maka kolaborasi pemerintah dapat dilakukan oleh 5 (lima) *stakeholders* seperti pemerintah kota, korporasi, kampus/universitas, komunitas, dan kampung. Dalam menangani permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan lingkungan melalui CSR. Program yang dilakukan memberikan dampak positif dengan terwujudnya kepastian lapangan pekerjaan, masyarakat dibekali *soft skill* dan *hard skill*, dan perekonomian masyarakat meningkat dengan baik.

Rujukan ketiga dengan judul **“Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo”** yang diteliti oleh Delila Putri Sadayi dan Lubna Salsabila (2022) menyimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan bisa diatasi melalui paradigma pembangunan alternatif yang memerlukan interaksi antara beberapa pihak yang terlibat dengan menggunakan metode pendekatan tata kelola kolaboratif. Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan sosial masyarakat, maka dari itu seluruh masyarakat diarahkan untuk mampu menghasilkan uang sendiri melalui pemberdayaan masyarakat.

Rujukan keempat dengan judul **“Model Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinsi Gorontalo)”** yang diteliti oleh Samin Latif dan Ikram Muhammad (2020) menyimpulkan bahwa penanganan kemiskinan dapat ditangani melalui program dusun terpadu mandiri dengan model kolaborasi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat. Program ini dilakukan melalui *sharring* sumber daya dari masing-masing pihak sesuai dengan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Hal ini dilakukan melalui mediasi pemerintah daerah sehingga hasilnya akan lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

Rujukan kelima dengan judul **“Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Padang Sarai Kota Padang)”** yang diteliti oleh Rima Putri Martias, Osmet, dan Hasnah (2022) menyimpulkan bahwa untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari kluster bantuan sosial dan kluster pemberdayaan masyarakat. Adanya mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-

Musrenbangkot) dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada tataran praktis dikembangkan sinergi program, sinei kegiatan antar program, dan sinergi pela (pelaksana) yang diikuti sharing dan kombinasi sumber daya yang dimiliki.

Rujukan keenam dengan judul **“Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang melalui Konsep *Collaborative Governance*”** yang diteliti oleh Mohammad Hafizh Waliyyudin, Evi Priyanti, dan Dewi Noor Azijah (2023) menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara potensi alam dan industri dengan kemiskinan yang terjadi mendorong pemerintah agar mampu melahirkan suatu solusi yang lebih inovatif untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya inovasi baru diharapkan kedepannya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan beberapa rujukan yang telah tertera diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu, dalam menanggulangi kemiskinan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu lembaga saja. Diperlukan adanya kolaborasi antar pihak dalam menanggulangi kemiskinan yang saling bersinergi. Selain itu, dari berbagai rujukan diatas penulis juga mendapatkan pengetahuan mengenai seberapa pentingnya adanya program-program inovatif dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam menjalankan program-program tersebut, dibutuhkan kerjasama yang yang baik antar pihak demi mewujudkan tujuan yang sama yaitu mengentaskan kemiskinan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori yang dijadikan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Perbedaan teori yang digunakan dapat menggali lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu penelitian.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam mengevaluasi dan memberi masukan terhadap pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan tambahan untuk kedepannya pemerintah dapat melakukan kolaborasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal ini agar angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi dapat menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian proposal penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian yang sistematis. Pembagian beberapa bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI, berisi teori yang dijadikan dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan di Kibupaten Bekasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi mengenai bagaimana metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian dan sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai hasil dari suatu penelitian yang membahas mengenai Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

BAB V KESIMPULAN, berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari suatu permasalahan yang dibahas dalam penelitian.